

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali, Zainudin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Daliyo, J. B, *et.al*, 2001, *Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT Prenhallindo.
- Dimiyati, Khudzalifah & Kelik Wardiyono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Hasan Basri Nata Menggala & Sarjita, 2005, *Pembatalan dan kebatalan Hak Atas Tanah*, Yogyakarta: TUJUGOGJA Pustaka.
- Marwan, 2009, *Kamu Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher.
- Murad, Rusmadi, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Alumni.
- Perangin, Effendi, 1991, *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali
- Sarjits, 2005, *Teknik & Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta: TUGUJOGJA pustaka
- Sarwono, 2016, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Soerjono & Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Shallman & Darsono, 2017, *Hukum Agraria*, Surakarta: Fakultas Hukum Unuversitas Muhammadiyah Surakarta,
- Sukmananto, Bambang & Achmad Sodiki, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supriyadi, Bambang Eko, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Waskito & Hadi Arnowo, 2017, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Jakarta: Kencana.

TESIS/SKRIPSI:

Hendro, 2009, *Tesis Kekuatan Pembuktian Tanah Eigendom Verponding Menurut Paeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK./PDT./2002)*, Depok: Universitas Indonesia,

Isnaini, Astri, 2017, *Tinjauan Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Di Kota Makassar*, Skripsi Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,

Lathif, Azharuddin dan Diana Mutia Habibaty, 2019, *Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah dan putusan Pengadilan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Purnomo, Ferry, 2020, *Tinjauan Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Barat (Eigendom) Studi Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Slw*, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Rusydi, Andi Mirza Paramitha, 2014, *Analisis Hukum Kepemilikan Tanah Eks Eigendom Verponding Setelah Lahirnya Undang-Undang Pokok*, Tesis Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, Makassar

Vania, Dea, 2011, *Tinjauan Atas Kekuatan Hukum Adat Otentik dalam Sengketa Tanah Bekas Eignedom Verponding Nomor 5725*, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Univeritas Indonesia

Wijaya, Aditya Dimas, *Kepemilikan Perseorangan Hak Atas Tanah Hak Milik Oleh Yayasan Di Kabupaten Karanganyar*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

JURNAL:

Adzini, Danica, 2019, *Status Hak Atas Tanah Hasil Okupasi Tentara Nasional Indonesia dan Sertipikat Hak Milik Hasil Konversi*, Jurnal Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019.

Hasna, Ulfia, *Status Kepemilikan Tanah Hak Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agrarian dihubungkan dengan PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, Jurnal Imu Hukum, Volume 3 No 1.

Huda, Ni'matul, 2000, *Beberapa Kendala dalam Penyelesaian Status Hukum Tanah Swapraja di Daerah Istimewa Yogyakarta*, JURNAL HUKUM. NO. 13 VOL. 7: APRIL 2000: 90 - 106).

Isnantiana, Nur Iftitah, 2017, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*, Jurnal Pemikiran Islam Volume

XVIII, No. 2, Juni 2017 : 41-56, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Istijab, 2018, *Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*, Widya Yuridika Jurnal Hukum Volume 1/Nomor 1/ Juni 2018.

Karina, Nadya, *et.al. Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Hak Barat (Recht Van Verponding) dengan Tanah Hak Pakai di Kota Tegal (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 1097k/Pdt/2013)*. Jurnal Diponegoro Law Review, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2016.

Mahendra, Rifki Khrisna, *et.al., Kekuatan Hukum Sertifikat Sebagai Pembuktian Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3.

Palele, Sekati Lenda, 2019, *Penyelesaian Sengketa Tanah di Pengadilan Menurut UUPA Nomor 5 tahun 1969*, Jurnal Lex Privatum Vol. VII/No.2/Febr/2019.

Roeroe, Sarah D.L., 2013, *Penegakan Hukum Agraria dan penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Proses Peradilan*, Jurnal Roeroe S.D.L: *Penegakan Hukum* Vol.I/No.6/Okttober-Desember /2013.

Suhartono, Slamet, 2011, *Penggunaan Alternatif Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Dengan Pemerintah (Wacana Mewujudkan Penyelesaian Sengketa Yang Seimbang)*, Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2011, Vol. 7, No. 14.

WEB:

Artikel dengan judul Perbedaan Litigasi dan Non Litigasi, Di akses pada hari Jumat, 29 Mei 2020 pada pukul 14.05 WIB. Sumber: <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.XtDtkNIxXIU> .

Artikel dengan judul Sengketa Tanah Sriwedari Telah Berakhir?, 29 November 2019, Sumber : http://www.josstoday.com/read/2018/11/29/51203/Sengketa_Tanah_Sriwedari_telah_Berakhir . Di unggah pada hari Senin, 5 Januari 2020 pada pukul 21.48 WIB.

Gultom, ,Dokumen-Dokumen yang dapat menjadi Alat Bukti Penguasaan atas Tanah, diakses dari <https://www.gultomlawsconsultans.com/dokumen-dokumen-yang-dapat-menjadi-alat-bukti-penguasaan-atas-tanah/> . Diakses pada 1 Mei 2010 pada pukul 20.00 WIB.

Hasanudin, S.H., M.H., Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan Burgerlijk Wetboek <https://pn-tilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata-dengan-menggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek/> diakses pada Jumat, 29 Mei 2020 pada pukul 19.20 WIB.

Tambahan Lembaran Negara RI Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. <https://ngada.org.pp24-1997pjl.htm> Di akses pada 14 Mei 2020 pada pukul 14.24 WIB

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3249K/Pdt/2012

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat (3);

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah;